



## BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 061/91/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 061/158/2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran, peningkatan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kudus dan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perlu melakukan penyempurnaan rumusan tujuan, sasaran strategis serta Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kudus dan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

*Handwritten signature and initials*

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kudus dan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kudus dan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kudus dan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

*Handwritten signature*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
Tanggal : 18 April 2022  
Nomor : 061 / 91 / 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

INSTANSI : <b>DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS</b> URUSAN : Pelaksanaan Bidang Kesehatan TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah.			
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	YANG BERTANGGUNG JAWAB
	(1)	(2)	(3)
a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Angka Harapan Hidup	a) Formulasi pengukuran : Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas
	2. Angka Kematian Ibu	a) Formulasi pengukuran : Banyaknya kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa nifas pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dikali 100.000 b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas
	3. Angka Kematian Bayi	a) Formulasi pengukuran : Banyaknya kematian bayi (dibawah 1 tahun) selama tahun tertentu dibagi banyaknya kelahiran hidup pada waktu tertentu dikali 1000 b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas

*Handwritten signature/initials*

b. Meningkatkan status kesehatan masyarakat	1. Indek Keluarga Sehat	a) Formulasi pengukuran : Proporsi keluarga sehat dibagi jumlah seluruh keluarga di wilayah tertentu dikali 100% b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas
c. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	1. Persentase Puskesmas dengan peningkatan status akreditasi	a) Formulasi pengukuran : Jumlah puskesmas yang meningkat status akreditasinya dalam periode tertentu dibagi jumlah puskesmas pada periode yang sama b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas
d. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas

<b>INSTANSI : DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUDUS</b> <b>URUSAN : Pemerintahan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga</b> <b>TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi wewenang daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah</b>			
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	YANG BERTANGGUNG JAWAB
a. Meningkatkan kualitas pendidikan	1. Persentase Akses dan Mutu Pendidikan, APK	a) Formulasi pengukuran : Jumlah nilai rata-rata dari Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Kelulusan (AL) dan Persentase Sekolah/Lembaga terakreditasi A jenjang pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Masyarakat	Kepala Dinas

*[Handwritten signature]*

		<p>b) Formulasi pengukuran APK : Jumlah siswa pada pendidikan dasar, PAUD, Pendidikan Masyarakat dibagi jumlah penduduk kelompok usia 4-6 Tahun (PAUD), 7-12 tahun (SD/MI), 13-15 (SMP/MTs) 7-18 Tahun (Kesejahteraan) dikali 100%</p> <p>c) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p>		
b. Meningkatkan kualitas pendidikan dasar	<p>1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar , Persentase akses dan Mutu Pendidikan Dasar</p>	<p>a) Formulasi pengukuran APK : Jumlah siswa pada pendidikan dasar dibagi penduduk kelompok usia 7-12 tahun (SD/MI) ,13-15 tahun (SMP/MTs) dikali 100%</p> <p>b) Formulasi pengukuran : Jumlah Nilai rata-rata dari Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Kelulusan (AL) dan Persentase Sekolah/Lembaga Terakreditasi A Jenjang Pendidikan Dasar</p> <p>c) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p>	Kepala Dinas	
c. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD serta pendidikan masyarakat	<p>1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, Persentase akses dan Mutu PAUD</p>	<p>a) Formulasi pengukuran : Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak dibagi jumlah anak usia 4-6 tahun dikali 100%</p> <p>b) Formulasi pengukuran : Jumlah Nilai rata-rata dari Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Kelulusan (AL) dan Persentase Sekolah/Lembaga Terakreditasi A Jenjang PAUD</p> <p>c) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p>	Kepala Dinas	
	<p>2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesejahteraan</p>	<p>a) Formulasi pengukuran : Jumlah siswa pada jenjang Pendidikan Kesejahteraan A,B,C dibagi jumlah penduduk kelompok usia 7-18 tahun dikali 100%</p>	Kepala Dinas	

*h + 71*

		<p>b) Formulasi pengukuran : Jumlah Nilai rata-rata dari Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Kelulusan (AL) dan Persentase Sekolah/Lembaga Terakreditasi A Jenjang Pendidikan Kesetaraan</p> <p>c) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p>	
d. Meningkatnya pembinaan Kepemudaan dan Keolahragaan	<p>1. Tingkat Partisipasi Pemuda dan Organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial</p>	<p>a) Formulasi pengukuran : Persentase Jumlah Pemuda dalam Organisasi dibagi jumlah penduduk usia 16-30 tahun dikali 100%</p> <p>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p>	Kepala Dinas
	<p>2. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri</p>	<p>a) Formulasi pengukuran : Jumlah pemuda yang berwirausaha dibagi jumlah penduduk usia 16-30 tahun dikali 100%</p> <p>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p>	Kepala Dinas
	<p>3. Persentase atlet binaan yang berprestasi</p>	<p>a) Formulasi pengukuran : Jumlah atlet binaan yang berprestasi dibagi jumlah atlet binaan dikali 100%</p> <p>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p>	Kepala Dinas
	<p>4. Persentase Wirausaha Muda</p>	<p>a) Formulasi pengukuran : Jumlah atlet binaan yang berprestasi dibagi jumlah atlet binaan dikali 100%</p> <p>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p>	Kepala Dinas
e. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	<p>1. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah</p>	<p>a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi PMPRB pemerintah daerah dari Inspektorat</p> <p>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p>	Kepala Dinas

*Handwritten signature/initials*

**INSTANSI : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KUDUS**

**URUSAN :** Pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata

**TUGAS POKOK :** Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan Kepada Daerah.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	YANG BERTANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah	1. Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	a) Formulasi pengukuran : Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu dibagi jumlah cagar budaya yang terdata dikali 100% b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas
	2. Persentase obyek pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	a) Formulasi pengukuran : Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan dibagi Jumlah Obyek Pemajuan dikali 100% b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas
b. Meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata	1. Persentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	a) Formulasi pengukuran : Kunjungan wisatawan mancanegara tahun n dikurangi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun (n-1) dibagi kunjungan wisatawan mancanegara tahun (n-1) dikali 100% b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas
	2. Persentase peningkatan jumlah wisatawan nusantara	a) Formulasi pengukuran : Kunjungan wisatawan nusantara tahun n dikurangi jumlah kunjungan wisatawan nusantara tahun (n-1) dibagi kunjungan wisatawan nusantara tahun (n-1) dikali 100% b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas

*Handwritten signature/initials*

	3. Tingkat hunian akomodasi	a) Formulasi pengukuran : Jumlah kamar yang terjual dibagi Jumlah kamar yang tersedia dikali 100% b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas
	4. Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	a) Formulasi pengukuran : Kontribusi sektor wisata terhadap PDRB harga berlaku (Angka dari BPS) b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas
	5. Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	a) Formulasi pengukuran : Jumlah pendapatan sektor Pariwisata dibagi Total PAD dikali 100% b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas
	6. Persentase jumlah pelaku ekraf yang dibina	a) Formulasi pengukuran : Jumlah pelaku ekraf yang dibina dibagi Jumlah pelaku ekraf dikali 100% b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas
c. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	1. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas

h 471

INSTANSI : **DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

URUSAN : Pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	YANG BERTANGGUNG JAWAB
	(2)	(3)	(4)
a. Meningkatkan Keluarga Berencana	1. Angka pertumbuhan penduduk	$a) \left( \left( \frac{Jml\ Penduduk\ th\ n}{Jml\ Penduduk\ th\ n-1} \right)^{1/1} - 1 \right) \times 100$ b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas
	2. Total Fertility Rate	a) Formulasi pengukuran : Jumlah Kelahiran per kelompok umur dibagi wanita usia subur per kelompok umur b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas
b. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	a) Formulasi pengukuran : Angka Hasil Survey BPS b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas
	2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dalam bekerja	a) Formulasi pengukuran : Jumlah Angkatan Kerja perempuan dibagi Jumlah Penduduk Perempuan dikali 100% b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas

6-171

	3. Rasio KDRT	a) Formulasi pengukuran : Jumlah kasus KDRT dibagi Jumlah Rumah Tangga dikali 100% b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas
	4. Strata Kabupaten Layak Anak (KLA)	a) Formulasi pengukuran : Perhitungan dari Kementerian Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas
c. Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Rasio PMKS	a) Formulasi pengukuran : Jumlah PMKS dibagi jumlah Penduduk dikali 100% b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas
	2. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan, pengemis dikali 100% b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	a) Formulasi pengukuran : Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan, pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan, pengemis dikali 100% b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas
d. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas

*Handwritten signature/initials*

INSTANSI : **DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN KUDUS**

URUSAN : Pemerintahan di bidang Perdagangan

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	YANG BERTANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Meningkatkan kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	1. Persentase PDRB sektor Perdagangan	a) Formulasi pengukuran : PDRB Sektor Perdagangan dibagi total PDRB kali 100% b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas
b. Meningkatnya Pertumbuhan sektor perdagangan	1. Persentase pertumbuhan sektor Perdagangan	a) Formulasi pengukuran : PDRB Sektor Perdagangan tahun n dikurangi PDRB sektor Perdagangan n-1 dibagi PDRB Sektor Perdagangan tahun n-1 kali 100% b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas
	2. Jumlah ekspor non migas	a) Formulasi pengukuran : Nilai Ekspor Non Migas b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas
c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas

*Handwritten signature/initials*

**INSTANSI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN KUDUS**

**URUSAN :** Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

**TUGAS POKOK :** Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	YANG BERTANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan tertib administrasi desa	1. Persentase kenaikan desa mandiri sesuai Indeks Desa Membangun (IDM)	a) Formulasi pengukuran : Persentase peningkatan status desa mandiri b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas
b. Peningkatan Klasifikasi Desa	1. Jumlah Desa meningkat Klasifikasinya dibagi Jumlah Desa dibagi 100%	a) Formulasi pengukuran : Persentase Desa yang Akuntabilitasnya baik di Kabupaten Kudus dibagi Desa di Kabupaten Kudus b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas
c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas

*Handwritten signature/initials*

INSTANSI : **DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KUDUS**

URUSAN : Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM

TUGAS POKOK : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepada Daerah.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	YANG BERTANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Meningkatkan kesempatan kerja	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	a) Formulasi Pengukuran : Jumlah Angkatan Kerja (AK) dibagi Jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) dikali 100 b) Tipe Pengukuran : Non Kumulatif	Kepala Dinas
	2. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	a) Formulasi Pengukuran : Kesempatan kerja dibagi Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke atas dikali 100% b) Tipe Pengukuran : Non Kumulatif	Kepala Dinas
b. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	1. Tingkat Pengangguran Terbuka	a) Formulasi pengukuran : Jumlah pengangguran dibagi jumlah penduduk angkatan kerja dikali 100% b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas
c. Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja	1. Persentase Penyelesaian Kasus PHI/PHK	a) Formulasi pengukuran : Jumlah Kasus PHI/PHK yang terselesaikan dibagi Jumlah Kasus PHI/PHK yang masuk dikali 100% b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas

*Handwritten signature/initials*

d. Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Perkapita	1. Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	a) Formulasi Pengukuran : PDRB Sektor Industri Pengolahan dibagi PDRB Kabupaten Kudus dikali 100% b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas
e. Meningkatkan pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	1. Persentase Pertumbuhan IKM	a) Formulasi Pengukuran : Perbandingan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) tahun ini dengan Jumlah tahun lalu dikali 100% b) Tipe Pengukuran : Non Kumulatif	Kepala Dinas
f. Meningkatkan pengembangan peran KUKM dalam rangka penguatan industri rakyat	1. Persentase Perkembangan UMKM	a) Formulasi Pengukuran : Jumlah Usaha Kecil dan Menengah/ Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dikali 100% b) Tipe Pengukuran : Non Kumulatif	Kepala Dinas
	2. Persentase Koperasi Aktif	a) Formulasi Pengukuran : Jumlah koperasi aktif dibagi Jumlah seluruh koperasi dikali 100% b) Tipe Pengukuran : Non Kumulatif	Kepala Dinas
g. Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	1. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas

*Handwritten signature*

INSTANSI : **DINAS PERHUBUNGAN**  
 URUSAN : Urusan Pemerintah bidang Perhubungan  
 TUGAS POKOK : Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas diberikan kepada daerah.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	YANG BERTANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan LLAJ yang berkeselamatan mendukung pengembangan wilayah	1. Rasio Konektivitas Kabupaten	a) Formulasi pengukuran : Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten dikali bobot trayek dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas
b. Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan antar wilayah	1. V/C Ratio ruas jalan utama pada jam-jam sibuk  2. Persentase penanganan daerah rawan kecelakaan	a) Formulasi pengukuran : Rata-rata volume lalu lintas di ruas jalan utama pada jam sibuk dibagi kapasitas ruas jalan b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas
		a) Formulasi pengukuran : Jumlah daerah rawan kecelakaan yang ditangani dibagi jumlah total daerah rawan kecelakaan dikali 100% b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas

*Handwritten signature*

	3. Indeks angka kecelakaan lalu lintas	a) Formulasi pengukuran : Jumlah kecelakaan lalu lintas dibagi jumlah penduduk dikali 100.000 b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas
c. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas

<b>INSTANSI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS</b>			
<b>URUSAN : Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika</b>			
<b>TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.</b>			
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	YANG BERTANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Meningkatkan Indeks SPBE	1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	a) Formulasi pengukuran : Penilaian Indeks SPBE dari Kementerian PAN RB b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas
b. Meningkatkan kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik	1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik	a) Formulasi pengukuran : Penilaian dari Komisi Informasi b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas

6471

c. Meningkatnya kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten	1. Rasio ketercukupan data statistik sektoral	a) Formulasi pengukuran : Jumlah data yang tersedia dibagi Jumlah data yang dibutuhkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas
d. Meningkatnya keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah	1. Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	a) Formulasi pengukuran : Hasil Penilaian Indeks Keamanan Informasi (KAMI) b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas
e. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas

*h 19/10*

**INSTANSI : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUDUS**

**URUSAN :** Urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang kependudukan dan pencatatan sipil

**TUGAS POKOK :** Melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	YANG BERTANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan	1. Tingkat cakupan penyelenggaraan administrasi kependudukan	a) Formulasi pengukuran : (Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk/KTP ditambah Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun ditambah Cakupan Kepemilikan Akta Kematian) dibagi 3 b) Tipe Perhitungan : Kumulatif	Kepala Dinas
b. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas

*Handwritten signature/initials*

**INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUDUS**

**URUSAN : Pekerjaan Umum**

**TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	YANG BERTANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Meningkatkan kualitas Infrastruktur pekerjaan umum	1. Persentase Infrastruktur pekerjaan umum dalam kondisi mantap	a) Formulasi pengukuran : Persentase jalan, jembatan, drainase, irigrasi dalam kondisi mantap dibagi 4 b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas
b. Terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	1. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	a) Formulasi pengukuran : Persentase kesesuaian lahan terbangun dibandingkan Rencana Tata Ruang Wilayah b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas
c. Terwujudnya administrasi pertanahan sesuai ketentuan	1. Persentase penyelesaian administrasi pertanahan	a) Formulasi pengukuran : Jumlah berkas permohonan administrasi pertanahan yang terkena dampak proyek pemerintah yang sudah lengkap dibagi Jumlah bidang tanah yang terkena dampak proyek pemerintah dikali 100% b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas

*K-171*

d. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas
--	--	--	--------------

<b>INSTANSI : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUDUS</b> <b>URUSAN : Pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b> <b>TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman serta lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.</b>			
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	YANG BERTANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Meningkatnya kualitas perumahan, Kawasan Permukiman	1. Rasio Rumah Layak Huni	a) Formulasi pengukuran : Jumlah rumah layak huni dibagi jumlah seluruh rumah dikali 100% b) Tipe Perhitungan : Kumulatif	Kepala Dinas
	2. Persentase area Lingkungan Permukiman Kumuh	a) Formulasi pengukuran : Luas kawasan permukiman kumuh dibagi luas wilayah Kabupaten Kudus dikali 100% b) Tipe Perhitungan : Kumulatif	Kepala Dinas
	3. Persentase PSU Perumahan yang diserahkan ke Pemerintah Kabupaten	a) Formulasi pengukuran : Jumlah Perumahan yang PSU-nya sudah diserahkan ke Pemerintah Kabupaten dibagi jumlah Perumahan di Kabupaten Kudus dikali 100% b) Tipe Perhitungan : Kumulatif	Kepala Dinas

*g r 21*

b. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	a) Formulasi pengukuran : $(0,376 \times \text{Indeks Kualitas Air}) + (0,405 \times \text{Indeks Kualitas Udara}) + (0,219 \times \text{Indeks Kualitas Lahan})$ b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas
	2. Persentase pengelolaan sampah	a) Formulasi pengukuran : Jumlah sampah yang dikelola dibagi Potensi Timbunan Sampah Kabupaten dikali 100% b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas
	1. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas

INSTANSI : <b>DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KUDUS</b>			
URUSAN : Wajib Pangan, Pilihan Pertanian, Kelautan dan Perikanan			
TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian, perikanan dan ketahanan pangan.			
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	YANG BERTANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	a) Formulasi pengukuran : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi b) Tipe Perhitungan : Kumulatif	Kepala Dinas

*Handwritten signature*

	2. Indeks Ketahanan Pangan	a) Formulasi pengukuran : Indeks Ketahanan Pangan b) Tipe Perhitungan : Kumulatif	Kepala Dinas
b. Meningkatkan ketersediaan Pangan yang berkualitas	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	a) Formulasi pengukuran : Skor PPH Ketersediaan b) Tipe Perhitungan : Kumulatif	Kepala Dinas
	2. Angka ketersediaan energi	a) Formulasi pengukuran : Jumlah kalori tersedia dibagi jumlah penduduk dibagi jumlah hari b) Tipe Perhitungan : Kumulatif	Kepala Dinas
c. Meningkatkan kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	1. Persentase PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	a) Formulasi pengukuran : Persentase PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan b) Tipe Perhitungan : Kumulatif	Kepala Dinas
d. Meningkatkan produksi hasil pertanian dan perikanan	1. Persentase peningkatan produksi hasil pertanian dan perikanan	a) Formulasi pengukuran : Persentase peningkatan produktivitas hasil pertanian/perkebunan ditambah persentase peningkatan produksi perikanan dibagi 3 b) Tipe Perhitungan : Kumulatif	Kepala Dinas
	2. Nilai Tukar Petani (NTP)	a) Formulasi pengukuran : Jumlah hasil yang diterima petani dibagi jumlah total pengeluaran petani dikali 100 b) Tipe Perhitungan : Kumulatif	Kepala Dinas
e. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas

*Handwritten signature/initials*

<b>INSTANSI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUDUS</b>			
<b>URUSAN : Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal</b>			
<b>TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah</b>			
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	YANG BERTANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	1. Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelayanan Berusaha	a) Formulasi pengukuran : Hasil Penilaian dari BKPM b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas
b. Meningkatnya iklim investasi	1. Realisasi investasi	a) Formulasi pengukuran : Penjumlahan Nilai Realisasi Investasi terlaporkan dan Realisasi Investasi yang belum terlaporkan b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas
c. Meningkatnya Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas

*Handwritten signature*

INSTANSI : **DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUDUS**

URUSAN : Wajib Perpustakaan dan Kearsipan

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepada Daerah.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	YANG BERTANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan	1. Persentase perpustakaan yang memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP)	a) Formulasi pengukuran : Jumlah perpustakaan yang memiliki NPP dibagi jumlah perpustakaan dikali 100% b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas
	2. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	a) Formulasi pengukuran : Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas
	3. Indeks pembangunan literasi masyarakat	a) Formulasi pengukuran : Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas

*h r p t*

b. Meningkatnya tertib arsip Perangkat Daerah	1. Indeks Kearsipan Daerah	a) Formulasi pengukuran : Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) dan Nilai Hasil Pengawasan Internal Perangkat Daerah Kabupaten Kudus b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas
c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Dinas

<p>INSTANSI : <b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUDUS</b></p> <p>URUSAN : Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat</p> <p>TUGAS POKOK : a. Menegakkan Perda dan Perkada b. Menyelenggarakan ketertiban Umum dan Ketentraman c. Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat</p>			
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	YANG BERTANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1. Indeks Rasa Aman	a) Formulasi pengukuran : Penanganan gangguan tibum tranmas dikali Luas wilayah gangguan tibum tranmas dibagi Jumlah Penduduk b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Satpol PP

*Handwritten signature/initials*

b. Meningkatnya ketertiban umum, keamanan, dan kenyamanan lingkungan	1. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	a) Formulasi pengukuran : Hasil survei angka gangguan Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan Lingkungan b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Satpol PP
	2. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Keamanan Lingkungan	a) Formulasi pengukuran : Jumlah Siskampling aktif dibagi Jumlah RW dikali 100% b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Satpol PP
c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Satpol PP

8871

INSTANSI : **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KUDUS**

URUSAN : Unsur Penunjang urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

TUGAS POKOK : Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	YANG BERTANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	1. Indeks Perencanaan Pembangunan	a) Formulasi pengukuran : Kesesuaian muatan program atau kegiatan antar Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran (Jumlah program RKPD yang konsisten terhadap program RPJMD dibagi Jumlah Program RPJMD dikali 100%) + (Jumlah Program APBD yang konsisten dengan RKPD dibagi Jumlah program RKPD dikali 100%) dibagi 2 (dua) b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Badan
b. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah	1. Persentase hasil kelibangan yang digunakan dalam penyusunan kebijakan daerah	a) Formulasi pengukuran : Jumlah hasil kelibangan yang digunakan dalam penyusunan kebijakan daerah dibagi Jumlah hasil kelibangan dibagi 100% b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Badan
c. Meningkatnya Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Badan

*Handwritten signature/initials*

INSTANSI : **BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN KUDUS**

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	YANG BERTANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Terwujudnya Pengelolaan Manajemen ASN yang berkualitas	1. Indeks Merit Sistem	a) Formulasi pengukuran : Jumlah Nilai Indeks Merit Sistem b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Badan
b. Meningkatkan kualitas SDM sesuai standar kompetensi	1. Indeks Profesionalisme ASN	a) Formulasi pengukuran : Jumlah Nilai Indeks Profesionalisme ASN b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Badan
c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Badan

*Handwritten signature*

**INSTANSI : BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUDUS**

**URUSAN : Penunjang**

**TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah.**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	YANG BERTANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	a) Formulasi pengukuran : PAD dibagi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dikali 100% b) Tipe Perhitungan : Kumulatif	Kepala Badan
	2. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	a) Formulasi pengukuran : Hasil Pemeriksaan Keuangan oleh BPK b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Badan
b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Persentase peningkatan PAD per tahun	a) Formulasi pengukuran : PAD Tahun ini dikurangi PAD tahun lalu dibagi PAD tahun lalu dikali 100% b) Tipe Perhitungan: Kumulatif	Kepala Badan
c. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan dan Daerah (IPKD)	a) Formulasi pengukuran : Hasil Penilaian Mandiri dari Bappeda dan Inspektorat b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Badan

4 496

	2. Persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total asset yang dimiliki Pemerintah Daerah	a) Formulasi pengukuran : Hasil Pemeriksaan BPK b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Badan
d. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	1. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Badan

<b>INSTANSI : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUDUS</b>			
<b>URUSAN : Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik</b>			
<b>TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.</b>			
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN</b>	<b>YANG BERTANGGUNG JAWAB</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Meningkatkan konduksifitas daerah	1. Indeks Toleransi	a) Formulasi pengukuran : Nilai rata-rata persentase potensi konflik agama, gangguan keamanan dari kelompok radikal dan konflik sosial yang tertangani b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Badan
b. Meningkatnya pendidikan karakter dan sadar keberagaman	1. Persentase potensi konflik SARA yang tertangani	a) Formulasi pengukuran : Jumlah potensi konflik SARA yang tertangani dibagi jumlah potensi konflik SARA dikali 100% b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Badan

*h 17k*

	2. Persentase potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal yang tertangani	a) Formulasi pengukuran : Jumlah potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal yang tertangani dibagi jumlah potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal dikali 100% b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Badan
	3. Persentase potensi konflik sosial yang tertangani	a) Formulasi pengukuran : Jumlah potensi sosial yang tertangani dibagi jumlah potensi konflik sosial dikali 100% b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Badan
	4. Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	a) Formulasi pengukuran : Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang aktif dibagi Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang terdata dikali 100% b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Badan
	5. Persentase Pendidikan Politik Masyarakat	a) Formulasi pengukuran : Jumlah masyarakat yang mendapat pendidikan politik dibagi target masyarakat yang mendapat pendidikan politik dikali 100% b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Badan
	1. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Badan
c) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			

*R 131*

INSTANSI : **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUDUS**

URUSAN : Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

TUGAS POKOK : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	YANG BERTANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Meningkatkan Penanganan Bencana Kabupaten	1. Persentase desa tangguh bencana	a) Formulasi pengukuran : Jumlah Desa Tangguh Bencana dibagi Desa Rawan Bencana dikali 100% b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Pelaksana
	2. Persentase masyarakat teredukasi	a) Formulasi pengukuran : Jumlah masyarakat teredukasi dibagi jumlah masyarakat di daerah rawan bencana dikali 100% b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Pelaksana
	3. Cakupan Penangan Bencana Alam	a) Formulasi pengukuran : Jumlah Objek terdampak yang ditangani dibagi jumlah seluruh objek terdampak dikali 100% b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Pelaksana
	4. Nilai Indek Ketahanan Daerah	a) Formulasi pengukuran : Penilaian dari BNPB b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kepala Pelaksana

*Handwritten signature*

	5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	<p>a) Formulasi pengukuran : Jumlah warga negara yang akan memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dikali 100%</p> <p>b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p>	Kepala Pelaksana
	6. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	<p>a) Formulasi pengukuran : Jumlah warga negara yang akan memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dikali 100%</p> <p>b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p>	Kepala Pelaksana
	7. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	<p>a) Formulasi pengukuran : Jumlah warga negara yang akan memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dikali 100%</p> <p>b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p>	
b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	<p>a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat</p> <p>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p>	Kepala Pelaksana

28/11

INSTANSI : <b>INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUDUS</b>			
URUSAN : Urusan Penunjinag Bidang Pengawasan			
TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.			
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	YANG BERTANGGUNG JAWAB
	(2)	(3)	(4)
a. Meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	1. Indeks Kapabilitas APIP	a) Formulasi pengukuran : Hasil evaluasi BPKP b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Inspektur
	2. Nilai Efektivitas Pengawasan	a) Formulasi pengukuran : Rata-rata efektifitas kinerja OPD ditambah 20 kali nilai maturitas SPIP OPD b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Inspektur Pembantu I, II, III
b. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Inspektur

ke 131

INSTANSI : <b>SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUDUS</b>			
URUSAN : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintah			
TUGAS POKOK : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, rapat DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah			
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	YANG BERTANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	1. Persentase jumlah ranperda yang disahkan dari jumlah ranperda yang dibahas	a) Formulasi pengukuran : Ranperda yang dibahas dibagi Ranperda yang diajukan x 100% b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Sekretaris Dewan
b. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Sekretaris Dewan

876

<p>INSTANSI : <b>RSUD DR. LOEKMONOHADI KABUPATEN KUDUS</b></p> <p>URUSAN : Pelayanan Kesehatan</p> <p>TUGAS POKOK : Menyelenggarakan pelayanan di bidang kesehatan.</p>				
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	YANG BERTANGGUNG JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	
a. Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian	1. Capaian Pelayanan (BOR, ALOS, BTO, TOI, NDR, GDR)	a) Formulasi pengukuran : Hasil capaian pelayanan b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Direktur	
b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian Kesehatan RSUD dr. Loekmono Hadi	1. Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM)	a) Formulasi pengukuran : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Direktur	
c. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Direktur	

*Handwritten signature*

<div>INSTANSI : <b>SEKRETARIAT DAERAH</b></div> <div>URUSAN : Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</div> <div>TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pembinaan administratif aparat sipil negara perangat daerah dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta pelayanan administrasi</div>			
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	YANG BERTANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Meningkatkan Efektifitas serta Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	1. Nilai LPPD	a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari Kementerian Dalam Negeri b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Asisten Pemerintahan dan Kesra
	2. Angka Inflasi Daerah	a) Formulasi pengukuran : Inflasi tahun kalender di Kabupaten Kudus, data BPS b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
	3. Nilai Akuntabilitas Kinerja	a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Kementerian PAN RB b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Asisten Administrasi Umum
	4. Indeks Reformasi Birokrasi	a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN RB b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Asisten Administrasi Umum

*h s jk*

	5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Asisten Administrasi Umum
--	-------------------------------------	---	---------------------------

1st

INSTANSI : **KECAMATAN**  
URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian  
TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang meliputi Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi dan Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pelayanan Umum dan Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	YANG BERTANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	1. Indeks Pemerintahan Kecamatan	a) Formulasi pengukuran : $(10\% \times \text{Persentase Desa Tanggap Bencana di Kecamatan}) + (20\% \times \text{penurunan gangguan trantibum}) + (25\% \times \text{Desa Tertib Administrasi}) + (10\% \times \text{lembaga kemasyarakatan desa yang beradministrasi baik}) + (25\% \text{ persentase pelayanan kepada masyarakat yang sesuai ketentuan}) + (10\% \times \text{persentase sarpras pelayanan umum dalam kondisi baik})$ b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Camat
b. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah dari Inspektorat b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Camat



Handwritten signature or initials.